

# HISTORIA PEDAGOGIA

## Jurnal Penelitian dan Inovasi Pendidikan Sejarah

---

Vol. 14, Nomor 24 Tahun 2025  
<https://journal.unnes.ac.id/journals/hp>

### GELOMBANG KRISIS 1997-1998: RUNTUHNYA ORDE BARU DAN LAHIRNYA BABAK BARU EKONOMI INDONESIA

Cavan Nizar Chalandra<sup>1</sup>, Nurul Hidayah<sup>2</sup>, Adisha Khansa Aulia<sup>3</sup>

#### ABSTRACT

The 1997-1998 economic crisis was a pivotal event in Indonesian history, marking the collapse of the New Order and the beginning of democratization. This study analyzes Indonesia's pre-crisis economic conditions, the root causes of the crisis, its unfolding dynamics, multidimensional impacts, and the government's mitigation efforts. Using a qualitative method based on literature review from academic sources, international reports, and policy documents, the research finds that the crisis stemmed not only from external shocks such as the Thai financial collapse but also from long-standing structural weaknesses within Indonesia's economy. These vulnerabilities included heavy dependence on foreign debt, an overvalued rupiah, a fragile banking sector, and an oligarchic economic structure. The crisis caused severe economic contraction of 13.7%, increased poverty from 15% to 33%, and triggered inflation of 77.6%. Social unrest escalated, culminating in President Suharto's resignation in May 1998. Mitigation measures included banking restructuring through IBRA/BPPN, IMF-supported reform programs, stabilization of monetary-fiscal policies, and political reforms essential for recovery. Despite the prolonged recovery process, the crisis ultimately spurred Indonesia's transition toward a more democratic and transparent economic system.

**Keywords:** *Economic Crisis 1997-1998, New Order, Reformation, IMF, Banking Restructuring.*

---

<sup>1</sup> Universitas Negeri Semarang, [cavannizar067@students.unnes.ac.id](mailto:cavannizar067@students.unnes.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Negeri Semarang, [adishakhansa@students.unnes.ac.id](mailto:adishakhansa@students.unnes.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Negeri Semarang, [nurulhidayah5273@students.unnes.ac.id](mailto:nurulhidayah5273@students.unnes.ac.id)

© All rights reserved

2025 Departemen Sejarah FISIP UNNES

Gedung C5 Lantai 1 FISIP UNNES

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

## PENDAHULUAN

Krisis ekonomi 1997-1998 merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah perekonomian Indonesia karena mengubah arah pembangunan nasional secara drastis. Sebelum krisis, Indonesia dikenal sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan relatif stabil, bahkan sering disebut sebagai salah satu “Macan Asia” dengan pertumbuhan rata-rata di atas 7 persen per tahun. Meskipun demikian, struktur ekonomi Indonesia pada masa itu memiliki kerentanan yang tidak terlihat, seperti ketergantungan besar pada investasi asing dan pinjaman luar negeri. Banyak perusahaan mengandalkan utang dalam mata uang asing tanpa sistem perlindungan nilai tukar, sehingga ketika rupiah melemah, beban utang mereka meningkat tajam dan menimbulkan instabilitas.

Krisis mulai terasa ketika Thailand mendevaluasi Baht pada Juli 1997, memicu kepanikan pasar keuangan di Asia Tenggara. Nilai tukar rupiah jatuh drastis dari sekitar Rp 2.600 menjadi Rp 16.800 per dolar AS, menyebabkan inflasi tinggi dan meruntuhkan sektor industri serta perdagangan. Ribuan perusahaan gulung tikar dan jutaan pekerja kehilangan pekerjaan. Krisis ekonomi kemudian berkembang menjadi krisis sosial dan politik yang meluas. Ketidakpuasan publik terhadap pemerintah menguat, aksi demonstrasi terjadi di berbagai wilayah, dan puncaknya terjadi pada Mei 1998 ketika gelombang kerusuhan mendorong Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah lebih dari tiga dekade berkuasa.

Memahami krisis 1997-1998 memerlukan peninjauan menyeluruh mengenai kondisi pra-krisis, penyebab utama kerentanan ekonomi nasional,

dinamika perkembangan krisis, serta dampak yang ditimbulkannya. Selain itu, analisis terhadap langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah, Bank Indonesia, dan lembaga internasional seperti IMF penting untuk mengetahui bagaimana Indonesia berupaya bangkit dari situasi tersebut. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk memberikan gambaran utuh mengenai gelombang krisis 1997-1998 yang berujung pada runtuhnya Orde Baru sekaligus menandai awal baru bagi perekonomian Indonesia. Pemahaman atas peristiwa ini diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga bagi pembangunan ekonomi yang lebih tangguh di masa mendatang.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, karena tujuan utama studi adalah menggambarkan secara mendalam peristiwa krisis ekonomi 1997-1998 beserta dinamika, penyebab, dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Metode deskriptif dipilih karena penelitian ini tidak melakukan manipulasi variabel, melainkan memotret peristiwa sebagaimana adanya dengan menekankan pemahaman kontekstual atas fenomena yang terjadi pada masa tertentu. Dalam teori penelitian deskriptif, peneliti berusaha melukiskan gejala yang menjadi pusat perhatiannya sebagaimana kenyataan yang berlangsung, tanpa memberikan perlakuan terhadap variabel penelitian (Sujana & Ibrahim, 1989, dalam Soendari, 2012). Pendekatan ini selaras dengan karakter penelitian sejarah

ekonomi, karena peneliti menggambarkan rangkaian peristiwa krisis berdasarkan dokumen dan sumber tertulis.

Mengacu pada penjelasan Saebani (2024) dalam buku Metode Penelitian, penelitian deskriptif kualitatif dilakukan dengan bertolak dari masalah aktual, kemudian dianalisis dengan pendekatan rasional dan empiris untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang menafsirkan makna di balik data, sehingga analisis tidak bertujuan melakukan generalisasi tetapi lebih menekankan pemahaman fenomena secara menyeluruh. Saebani menegaskan bahwa proses penelitian harus dimulai dari rumusan masalah, penentuan sumber data, teknik pengumpulan data, hingga strategi analisis data yang dilakukan secara sistematis dan dapat direplikasi oleh peneliti lain.

Data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis historis. Sesuai dengan penjelasan Saebani (2024) mengenai analisis data kualitatif, tahap analisis dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul mula-mula diklasifikasikan berdasarkan tema rumusan masalah, seperti kondisi pra-krisis, penyebab krisis, dinamika krisis, dampak ekonomi dan sosial, serta langkah penanggulangan. Setelah data diklasifikasi, peneliti melakukan interpretasi dengan menelaah

hubungan sebab-akibat, konteks sosial politik, serta perubahan kebijakan ekonomi yang terjadi selama krisis. Pendekatan ini sesuai dengan karakter penelitian deskriptif yang bertujuan menjelaskan fenomena secara mendalam sekaligus mengikuti langkah pengolahan data yang disebut sebagai metode analitis dalam teori penelitian deskriptif (Soendari, 2012).

Analisis historis dilakukan dengan menelusuri kronologi peristiwa dari sebelum krisis hingga masa pemulihan, sesuai arahan bahwa penelitian deskriptif dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antar gejala tanpa memanipulasi variabel. Dengan demikian, penelitian ini dapat direplikasi oleh peneliti lain melalui langkah yang sama: memilih literatur yang kredibel, melakukan klasifikasi tematik, dan menafsirkan data berdasarkan pendekatan kualitatif deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kondisi Ekonomi Indonesia Pra-Krisis**

Menjelang pertengahan tahun 1997, kondisi ekonomi Indonesia terlihat sangat baik jika dilihat dari angka-angka makro. Pemerintah Orde Baru sudah lama membangun citra bahwa ekonomi Indonesia stabil, tumbuh cepat, dan aman dari guncangan. Bank Indonesia mencatat bahwa hingga pertengahan 1997, perekonomian Indonesia secara umum menunjukkan perkembangan mengesankan sebagaimana tercermin

pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi (rata-rata di atas 7% pertahun) dan laju inflasi yang rendah (di bawah 10%) (Joseph, 1999). Gambaran inilah yang membuat banyak orang merasa Indonesia sedang berada dalam masa keemasan ekonominya.

Keadaan tersebut tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang saat itu dianggap hati-hati dan terukur. Bahkan laporan resmi menyebut bahwa kebijakan moneter dan fiskal yang berhati-hati. Dengan kombinasi kedua kebijakan tersebut maka berdampak pada mantapnya situasi ekonomi secara makro dan iklim usaha yang kondusif (Joseph, 1999). Artinya, secara umum pemerintah berhasil menjaga harga tetap stabil dan membuat dunia usaha yakin untuk terus berkembang. Selain itu, investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing juga meningkat sangat pesat. Ibnu Anggara (2015) menjelaskan bahwa pada 1995/1996 kegiatan investasi di Indonesia semakin marak sehingga menyebabkan kenaikan pertumbuhan pada sektor ekonomi seperti konstruksi dan industri, besarnya minat investasi ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Banyak perusahaan memperluas bisnisnya, terutama di properti, perbankan, dan industri. Aliran modal asing yang deras membuat ekonomi terasa penuh optimisme.

Tidak hanya itu, laporan Tarmidi (1999) juga memperkuat kesan bahwa Indonesia berada dalam kondisi ekonomi yang kuat. Ia menyatakan

bahwa sebelum krisis, fundamental ekonomi Indonesia dipandang cukup kuat, pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasi terkendali, tingkat pengangguran rendah, cadangan devisa cukup besar. Dengan indikator yang terlihat baik ini, pemerintah dan masyarakat percaya bahwa Indonesia tidak akan mudah goyah. Namun, kondisi baik tersebut ternyata hanya sebatas di permukaan. Di balik angka-angka makro yang stabil, terdapat banyak masalah serius yang tidak terlihat oleh publik. Tarmidi mengingatkan bahwa meskipun tampak kuat, di balik ini terdapat beberapa kelemahan struktural seperti peraturan perdagangan domestik yang kaku dan berlarut-larut, monopoli impor yang menyebabkan kegiatan ekonomi tidak efisien dan kompetitif. Artinya, sistem ekonomi Indonesia sebenarnya rapuh karena bergantung pada pinjaman luar negeri jangka pendek yang tidak dilindungi (tidak di-hedging).

Selain itu, banyak perusahaan besar meminjam uang dari luar negeri dalam jumlah sangat besar, dan pinjaman tersebut harus dibayar dalam dolar. Selama nilai rupiah stabil, semuanya terlihat baik-baik saja. Tetapi begitu nilai tukar terganggu, beban utang itu menjadi sangat berat. Tarmidi menegaskan bahwa yang jebol bukanlah sektor rupiah dalam negeri, melainkan sektor luar negeri. Artinya, masalah sebenarnya adalah ketergantungan berlebihan pada utang luar negeri yang tidak dikelola dengan benar.

Kelemahan ini semakin diperparah dengan defisit transaksi berjalan yang terus terjadi setiap tahun. Walaupun defisit ini masih dianggap wajar oleh pemerintah, kenyataannya Indonesia semakin bergantung pada modal asing untuk menutupi kekurangan tersebut. Ketika ada gejolak ekonomi di Thailand pada pertengahan 1997, investor asing langsung panik dan menarik dananya dari Indonesia. Penarikan modal secara mendadak inilah yang membuat ekonomi Indonesia langsung goyah. Joseph dkk. mencatat bahwa Keraguan investor asing terhadap kesinambungan sektor eksternal nasional sebagai dampak penularan krisis keuangan dan politik di Thailand, telah secara cepat diikuti penarikan dana sehingga telah berdampak sangat dalam terhadap kinerja perekonomian nasional.

Secara sederhana, kondisi pra-krisis dapat digambarkan sebagai berikut: Indonesia terlihat seperti rumah besar dan megah, namun dibangun di atas fondasi yang rapuh. Selama tidak ada gempa, rumah tersebut terlihat kokoh. Namun ketika guncangan kecil saja terjadi di Thailand, struktur ekonomi Indonesia langsung retak. Dengan begitu, jelas bahwa krisis yang terjadi pada 1997 bukan hanya disebabkan oleh faktor eksternal dari Thailand, tetapi juga karena kelemahan internal yang sudah menumpuk sejak lama. Stabilitas makro yang selama ini dibanggakan ternyata tidak cukup kuat untuk menghadapi tekanan eksternal. Pondasi ekonomi Indonesia yang rapuh terutama ketergantungan pada modal

asing dan lemahnya sektor perbankan menjadi pemicu utama runtuhnya stabilitas tersebut dan membuka jalan menuju krisis besar 1997-1998.

### **Penyebab Krisis Ekonomi 1997-1998**

Krisis ekonomi Indonesia tahun 1997-1998 tidak datang secara tiba-tiba dan bukan hanya sekedar persoalan melemahnya kurs rupiah belaka. Krisis ini merupakan bagian dari gelombang krisis Asia Timur yang dimulai dari Thailand pada Juli 1997. Ketika pemerintah Thailand melepaskan mata uang Baht dari patokan kursnya, pasar finansial internasional terkejut. Depresiasi besar terhadap Baht kemudian memicu kepanikan di kawasan dan memunculkan serangkaian aksi spekulatif terhadap mata uang negara Asia lainnya. Negara Asia Timur seperti Korea Selatan dan Malaysia juga terdampak, namun intensitas dampaknya berbeda-beda tergantung kekuatan fundamental ekonomi masing-masing negara. Dengan kata lain, krisis Asia Timur menjadi pemicu awal yang kemudian merembet ke Indonesia.

Namun faktor eksternal hanya menjadi pemicu awal. Yang membuat krisis ini menjadi sangat parah di Indonesia adalah lemahnya struktur ekonomi nasional sejak sebelum krisis. Pertumbuhan yang tinggi selama era Orde Baru bukan berasal dari kekuatan produksi domestik yang stabil, tetapi sangat bergantung pada aliran modal asing jangka pendek dan pinjaman luar negeri, terutama oleh sektor swasta.

Masalah utang luar negeri swasta yang besar dan tidak dilindungi hedging telah lama menjadi sumber kerentanan ekonomi Indonesia (Tarmidi, 1999). Ketika rupiah terdepresiasi tajam, perusahaan-perusahaan yang memiliki utang dolar langsung jatuh dan semakin memperburuk kondisi makro ekonomi nasional.

Selain itu, pemerintah mempertahankan nilai tukar rupiah dalam posisi yang terlalu kuat atau overvalued. Kebijakan ini menyebabkan barang impor menjadi murah dan melemahkan daya saing industri domestik (Tarmidi, 1999). Situasi tersebut menjadikan Indonesia sangat bergantung pada barang impor dan investasi asing, sehingga ketika investor asing menarik dananya, ekonomi Indonesia langsung terpukul keras. Sementara itu, negara Asia seperti Malaysia atau Korea memiliki basis industri domestik yang lebih kuat sehingga ketika krisis datang, struktur internal mereka relatif lebih tahan dibanding Indonesia.

Kondisi ekonomi Indonesia pra-krisis juga diperburuk oleh sistem ekonomi yang sangat dipengaruhi kepentingan kelompok dan konglomerat besar. Kebijakan ekonomi sering kali tidak murni berbasis kepentingan pembangunan nasional, tetapi tersandera oleh hubungan politik-ekonomi yang oligarkis. Karmeli & Fatimah menjelaskan bahwa krisis menyebabkan perubahan besar dalam tatanan ekonomi, sosial, dan politik Indonesia karena struktur ekonomi

sebelumnya terlalu bergantung pada kekuatan elit tertentu (Karmeli & Fatimah, 2008). Oleh karena itu, ketika tekanan eksternal mulai masuk, Indonesia runtuh bukan hanya secara ekonomi tetapi juga secara politik dan sosial.

Selain faktor internal dan eksternal dalam aspek finansial, persoalan ekonomi rakyat juga menjadi bagian penting penyebab rentannya Indonesia. Model pembangunan Orde Baru tidak berhasil menciptakan kekuatan ekonomi rakyat yang mandiri dan berkelanjutan. Mubyarto menegaskan bahwa dualisme ekonomi Indonesia menyebabkan ekonomi rakyat tidak mendapatkan tempat yang sepadan dalam kebijakan pembangunan nasional (Mubyarto, 2001). Ketika krisis mulai melanda, justru ekonomi rakyat yang paling terpukul tanpa adanya perlindungan sosial yang memadai.

Jika dibandingkan dengan negara Asia lain, kerentanan Indonesia terlihat jauh lebih besar. Thailand memang memicu krisis, namun negaranya relatif lebih cepat pulih. Korea Selatan melakukan restrukturisasi industri dan perbankan secara cepat. Malaysia berani mengambil kebijakan kontrol modal untuk mempertahankan stabilitas dalam negeri. Indonesia justru tenggelam paling dalam karena kombinasi fatal antara ketergantungan modal asing, struktur ekonomi yang rapuh, lemahnya sektor perbankan, dan pemerintah yang lebih sibuk menjaga

stabilitas politik daripada memperkuat fundamental ekonomi jangka panjang.

Dengan demikian, penyebab krisis ekonomi 1997-1998 bukan hanya persoalan spekulasi pasar internasional atau sentimen investor global semata. Krisis ini adalah hasil interaksi kompleks antara gelombang krisis Asia secara eksternal dengan kelemahan internal struktur ekonomi Indonesia yang telah menumpuk selama bertahun-tahun pada masa Orde Baru. Krisis itu menjadi bukti bahwa pertumbuhan yang tinggi tanpa fondasi ekonomi rakyat yang kuat hanya menghasilkan kemajuan semu yang mudah runtuh saat diterpa guncangan global.

### **Dinamika Krisis di Indonesia**

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 menjadi titik balik penting dalam perjalanan sejarah ekonomi nasional. Krisis ini tidak hanya menghancurkan stabilitas moneter, tetapi juga mengguncang sistem politik dan sosial yang telah mapan selama tiga dekade pemerintahan Orde Baru. Dalam konteks ekonomi pembangunan, peristiwa ini menunjukkan rapuhnya fondasi ekonomi Indonesia yang selama ini tampak kuat di permukaan, namun ternyata bergantung pada utang luar negeri, investasi jangka pendek, serta kebijakan ekonomi yang tidak berkelanjutan (Karmeli & Fatimah, 2008). Dinamika krisis di Indonesia dapat dijelaskan melalui beberapa tahap penting berikut ini.

#### 1) Jatuhnya Nilai Rupiah

Krisis di Indonesia berawal dari gejolak mata uang di kawasan Asia Tenggara. Krisis ini pertama kali terjadi di Thailand pada Juli 1997 ketika pemerintahnya tidak mampu mempertahankan nilai tukar baht terhadap dolar Amerika. Efek domino pun terjadi, investor asing mulai kehilangan kepercayaan terhadap stabilitas keuangan di negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Sebelum krisis, nilai rupiah stabil di kisaran Rp2.300 per dolar AS, bahkan perekonomian Indonesia dianggap sebagai salah satu yang terkuat di Asia. Namun, kenyataan berbalik drastis: pada awal 1998, nilai rupiah sempat menyentuh angka Rp17.000 per dolar AS (Tarmidi, 1999).

Pelemahan rupiah yang begitu cepat menandakan adanya masalah fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya ketergantungan dunia usaha terhadap pinjaman luar negeri dalam bentuk dolar. Ketika nilai rupiah jatuh, utang perusahaan meningkat berkali lipat, sementara pendapatan mereka tetap dalam rupiah. Akibatnya, banyak perusahaan tidak mampu melunasi utang dan mengalami kebangkrutan. Selain itu, krisis kepercayaan melanda sektor perbankan dan pasar saham. Para investor asing menarik modalnya secara besar-besaran (*capital flight*), memperparah tekanan terhadap nilai tukar (Utami & Rahayu, 2003).

Pelemahan rupiah yang begitu cepat menandakan adanya masalah fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya ketergantungan dunia usaha terhadap pinjaman luar negeri dalam bentuk dolar. Ketika nilai rupiah jatuh, utang perusahaan meningkat berkali lipat, sementara pendapatan mereka tetap dalam rupiah. Akibatnya, banyak perusahaan tidak mampu melunasi utang dan mengalami kebangkrutan. Selain itu, krisis kepercayaan melanda sektor perbankan dan pasar saham. Para investor asing menarik modalnya secara besar-besaran (*capital flight*), memperparah tekanan terhadap nilai tukar (Utami & Rahayu, 2003).

## 2) Kebijakan Pemerintah (Suku Bunga Tinggi dan Penutupan Bank)

Pemerintah Indonesia, melalui Bank Indonesia, mencoba mengendalikan krisis dengan menerapkan kebijakan moneter ketat. Salah satu langkah yang diambil adalah menaikkan suku bunga pinjaman dengan tujuan menarik kembali modal asing dan menahan laju pelemahan rupiah. Namun, kebijakan ini justru memperparah kondisi dunia usaha. Suku bunga yang melonjak tinggi membuat beban bunga pinjaman meningkat drastis, sementara sektor produksi mengalami tekanan berat karena biaya operasional naik. Banyak perusahaan akhirnya menghentikan kegiatan produksinya dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan (Utami & Rahayu, 2003). Selain kebijakan moneter,

pemerintah juga mengambil langkah tegas dalam sektor perbankan dengan menutup 16 bank swasta nasional pada November 1997. Penutupan bank dilakukan karena dianggap bermasalah dalam manajemen dan likuiditas. Namun, kebijakan ini menimbulkan efek domino yang tidak diantisipasi dengan baik. Penutupan bank tanpa adanya penjelasan yang transparan menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat, Nasabah berbondong-bondong menarik simpanannya karena takut uangnya tidak akan kembali, fenomena ini disebut bank run (Tarmidi, 1999).

Kepanikan tersebut menyebabkan sistem keuangan lumpuh. Banyak bank lain yang sebenarnya sehat ikut tertekan karena kehabisan likuiditas. Keputusan penutupan bank dinilai tergesa-gesa karena tidak disertai kebijakan penjaminan simpanan seperti yang ada sekarang melalui LPS. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan anjlok. Keadaan ini memperparah ketidakstabilan ekonomi dan mendorong pelarian modal lebih besar (Karmeli & Fatimah, 2008).

Selain itu, kebijakan fiskal yang diambil pemerintah juga tidak efektif. Pemerintah berusaha menjaga kestabilan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok melalui subsidi besar, tetapi hal ini justru membebani anggaran negara. Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan publik sangat rendah, sehingga menimbulkan



persepsi negatif dari masyarakat maupun lembaga internasional (Hermawandi, 2019).

### 3) Paket Bantuan IMF dan Syarat Letter of Intent

Ketika pemerintah tidak mampu lagi mengendalikan krisis, Indonesia akhirnya meminta bantuan kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Pada Oktober 1997, ditandatangani kesepakatan bantuan keuangan melalui dokumen yang disebut Letter of Intent (LoI). IMF menyetujui pinjaman sekitar 43 miliar dolar AS, namun bantuan tersebut disertai dengan berbagai persyaratan yang ketat dan sering kali kontroversial (Tarmidi, 1999). Persyaratan yang ditetapkan IMF meliputi langkah-langkah reformasi ekonomi, seperti liberalisasi sektor keuangan, deregulasi perdagangan, penghapusan subsidi bahan bakar dan listrik, serta privatisasi beberapa BUMN. Tujuannya adalah menciptakan ekonomi yang lebih efisien dan kompetitif. Namun, penerapan kebijakan ini justru memperburuk keadaan sosial. Penghapusan subsidi membuat harga kebutuhan pokok melonjak tajam, sementara daya beli masyarakat sudah sangat lemah akibat inflasi tinggi (Hermawandi, 2019).

Banyak pihak menilai kebijakan IMF bersifat terlalu teoritis dan tidak memperhatikan kondisi sosial-politik Indonesia yang sedang rapuh. Selain itu, program program IMF dianggap menekan dan tidak realistis untuk kondisi negara yang sedang

menghadapi kekacauan sosial. Hal ini membuat implementasi Letter of Intent sering kali tertunda. Di sisi lain, hubungan antara pemerintah Indonesia dan IMF tidak selalu harmonis karena dinilai tidak konsisten menjalankan komitmen reformasi (Karmeli & Fatimah, 2008).

Meski bantuan keuangan telah dikucurkan, stabilitas ekonomi belum pulih. Investor masih menahan diri karena situasi politik yang tidak pasti. Ketidakpastian ini menunjukkan bahwa krisis Indonesia bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan legitimasi politik dan tata kelola pemerintahan yang lemah (Hermawandi, 2019).

### 4) Kerusuhan Sosial dan Politik (Mei 1998) serta Pengunduran Diri Soeharto

Krisis ekonomi akhirnya meluas menjadi krisis sosial dan politik. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan meningkatnya pengangguran menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Ketimpangan sosial yang sudah lama terjadi semakin terasa, terutama karena sebagian besar sumber daya ekonomi dikuasai oleh kelompok elit yang dekat dengan kekuasaan. Dalam situasi ini, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap korup dan tidak transparan semakin besar (Rochadi, 2014).

Kondisi sosial yang tegang mencapai puncaknya pada Mei 1998. Gelombang

demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi politik dan ekonomi meluas di berbagai daerah. Aksi-aksi ini mendapat simpati luas dari masyarakat. Namun, ketika aparat keamanan menggunakan kekerasan terhadap demonstran di Trisakti pada 12 Mei 1998 dan menewaskan empat mahasiswa, situasi semakin memanas. Peristiwa ini memicu kerusuhan besar di Jakarta dan beberapa kota lain. Penjarahan, pembakaran, dan kekerasan terhadap warga sipil, terutama etnis Tionghoa, terjadi secara meluas (Hermawandi, 2019).

Kerusuhan Mei 1998 menandai puncak ketidakstabilan nasional. Selain menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi besar, peristiwa ini juga menunjukkan bahwa sistem politik otoriter Orde Baru telah kehilangan legitimasi. Di bawah tekanan dari berbagai pihak masyarakat, militer, dan lembaga internasional akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 (Rochadi, 2014).

## **Dampak Krisis terhadap Indonesia**

### **1) Dampak Ekonomi**

Krisis moneter 1997-1998 menimbulkan dampak ekonomi yang sangat parah bagi Indonesia. Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mengalami kontraksi tajam hingga sekitar -13,7% pada tahun 1998, yang menjadi salah satu penurunan ekonomi terdalam di Asia Tenggara saat itu. Kondisi ini disebabkan oleh kombinasi faktor seperti depresiasi rupiah yang ekstrem,

kebangkrutan sektor swasta akibat utang luar negeri, serta menurunnya investasi asing.

Sektor perbankan dan industri manufaktur menjadi korban utama. Banyak perusahaan tidak mampu membayar utang dalam dolar akibat melemahnya rupiah, sehingga memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan kapasitas produksi nasional. Laporan Dana Moneter Internasional (IMF) menyebut bahwa penurunan ekspor, inflasi yang tinggi, serta defisit neraca transaksi berjalan menyebabkan aktivitas ekonomi melemah secara menyeluruh (International Monetary Fund, 1998).

Krisis ini juga mengungkap kelemahan struktural ekonomi Indonesia yang selama masa Orde Baru tampak stabil di permukaan, tetapi sebenarnya bergantung pada aliran modal jangka pendek dan utang luar negeri.

### **2) Dampak Sosial**

Dampak sosial dari krisis jauh lebih luas dan kompleks. Penurunan nilai rupiah dan kenaikan harga barang-barang pokok menyebabkan lonjakan tingkat kemiskinan secara drastis. Kemiskinan meningkat dari sekitar 15% pada pertengahan 1997 menjadi lebih dari 33% pada akhir 1998, sehingga lebih dari 36 juta penduduk jatuh ke dalam kemiskinan absolut (Suryahadi et al., 2000).

Inflasi yang mencapai hampir 60% membuat harga pangan dan kebutuhan

dasar sulit dijangkau masyarakat. Sementara itu, meningkatnya pengangguran akibat kebangkrutan perusahaan memperparah ketimpangan sosial. Kondisi ini menciptakan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong meningkatnya potensi konflik sosial (Booth, 1999).

Di beberapa daerah, kerusuhan sosial dan kekerasan bernuansa etnis terjadi, terutama terhadap kelompok Tionghoa yang dianggap sebagai simbol kesenjangan ekonomi. Penelitian GSDRC menunjukkan bahwa ketegangan sosial yang meluas ini tidak hanya dipicu oleh kemiskinan, tetapi juga oleh ketidakadilan struktural dan pemerintahan yang korup selama era Orde Baru (GSDRC, 2009).

### 3) Dampak Politik

Krisis ekonomi 1997-1998 bertransformasi menjadi krisis legitimasi politik. Runtuhnya stabilitas ekonomi menyebabkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Orde Baru menurun drastis. Sistem politik yang selama tiga dekade terpusat pada kekuasaan Presiden Soeharto kehilangan daya kendalinya.

Tekanan sosial dan ekonomi yang menumpuk akhirnya memuncak pada gelombang demonstrasi mahasiswa pada Mei 1998 yang menuntut reformasi total. Tragedi penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 memperbesar eskalasi krisis, disusul oleh kerusuhan besar-besaran

di Jakarta yang menandai puncak ketidakstabilan nasional.

Situasi tersebut menjadi titik balik sejarah politik Indonesia. Di bawah tekanan masyarakat dan elite politik, Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, menandai berakhirnya rezim Orde Baru dan dimulainya era Reformasi. Masa ini membuka jalan bagi demokratisasi, desentralisasi, dan pembentukan sistem politik yang lebih terbuka. Namun, proses reformasi juga menghadirkan tantangan baru, seperti fragmentasi politik, korupsi, dan kesenjangan sosial yang masih diwarisi dari periode sebelumnya.

### Upaya Penanggulangan Krisis

Tentu, Nini akan mengubah penulisan kutipan dalam artikelmu menjadi \*kutipan langsung\* (menggunakan tanda petik) tanpa mengubah satu kata Restrukturisasi Perbankan (IBRA dan BPPN). Krisis keuangan yang dimulai pada pertengahan 1997 segera menjadi krisis sistemik dalam sektor perbankan Indonesia. Banyak bank menghadapi masalah likuiditas karena penarikan massal (bank runs) dan peningkatan utang luar negeri dalam dolar AS. Pemerintah, bersama IMF, mendirikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atau Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) pada Februari 1998 berdasarkan Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1998 untuk menangani masalah ini. Lembaga ini berperan sebagai satu-satunya otoritas untuk memperbaiki sistem perbankan

dan mengatur aset bermasalah (non-performing loans) dari bank-bank yang bangkrut (Saputri et al., 1999). Dalam pelaksanaannya, IBRA menutup 16 bank swasta yang dianggap insolven pada November 1997. Langkah ini menimbulkan kepanikan, namun menjadi awal dari proses pembersihan sistem perbankan nasional. IBRA juga menguasai sekitar Rp 650 triliun aset bermasalah dan utang konglomerat, termasuk dalam perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) (Adhyaksana, 2008). Meski program ini mendapat kritik karena penuh dengan korupsi dan kurangnya transparansi, restrukturisasi perbankan mampu mengembalikan kepercayaan pasar di awal 2000-an. Laporan Bank Dunia Mempertahankan Stabilitas, Memperdalam Reformasi (2003) menekankan bahwa penguatan BPPN merupakan elemen penting dalam mengembalikan stabilitas makro ekonomi setelah krisis. Di samping itu, menurut Chua (2008), kebijakan IBRA secara tidak langsung memicu reformasi konglomerasi Tionghoa-Indonesia yang sebelumnya terikat pada hubungan patronase dengan pemerintah Orde Baru. Restrukturisasi ini juga merupakan langkah pertama dari perubahan tata kelola perusahaan di Indonesia.

Bantuan IMF dan Reformasi Ekonomi. Pada Oktober 1997, Indonesia secara resmi meminta pertolongan dari International Monetary Fund (IMF) setelah cadangan devisa mengalami penurunan drastis. IMF menyetujui

paket pinjaman senilai USD 43 miliar dengan syarat pelaksanaan reformasi struktural melalui Surat Niatan (LoI). Terdapat 50 butir kebijakan reformasi di dalamnya, antara lain penghapusan subsidi bahan bakar minyak, liberalisasi sektor keuangan, penghentian praktik monopoli seperti Bulog dan monopoli cengkeh, serta privatisasi BUMN (Riyanto & Ariefana, 2014). Reformasi ini bertujuan untuk membangun transparansi ekonomi dan mengurangi pengaruh negara serta kroni bisnis, namun efeknya tidak segera tampak. Penghapusan subsidi menyebabkan harga barang kebutuhan dasar meningkat, sementara liberalisasi tiba-tiba mengakibatkan banyak perusahaan dalam negeri bangkrut. IMF juga mendapat kritik karena meminta kebijakan moneter ketat saat terjadi resesi, yang malah semakin memperburuk kontraksi ekonomi. Menurut Tabalujan (2001), hal ini menggambarkan minimnya corporate governance dan kemampuan hukum Indonesia dalam menerapkan reformasi ekonomi yang berlandaskan pasar. Namun, di era pemerintahan BJ Habibie, sejumlah langkah IMF dimodifikasi agar lebih sesuai dengan konteks. Pemerintah melakukan renegotiasi beberapa poin LoI, terutama terkait sosial, dengan memberikan bantuan dana untuk masyarakat yang kurang mampu. Pendekatan yang lebih responsif ini berkontribusi menurunkan inflasi dari 77% pada 1998 menjadi sekitar 3% pada tahun 1999 (Saputri et al., 1999). Kebijakan Stabilitas Moneter dan

Fiskal. Stabilisasi moneter merupakan langkah krusial untuk mengatasi inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah. Bank Indonesia meningkatkan suku bunga SBI menjadi 60% untuk menarik investasi asing dan mengendalikan penurunan nilai rupiah. Akan tetapi, kebijakan ini berdampak domino yang menyebabkan penurunan produksi dan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Agar seimbang, pemerintah melaksanakan program jaringan pengaman sosial melalui subsidi untuk pangan, kesehatan, dan pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dalam aspek fiskal, pemerintah melakukan kebijakan penghematan dengan menunda proyek infrastruktur besar dan mengutamakan pengeluaran sosial. Selain itu, restrukturisasi utang luar negeri dilakukan lewat London Club dan Paris Club, yang memberikan penjadwalan ulang pembayaran utang jangka panjang (Wibowo, 2024). Langkah-langkah ini menghasilkan hasil yang nyata: inflasi berhasil ditekan menjadi satu digit pada tahun 2000 dan nilai tukar rupiah tetap stabil di sekitar Rp 9.000 per dolar AS. Menurut Resosudarmo, pencapaian ini mengindikasikan betapa pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam pemulihan ekonomi setelah krisis. Reformasi Politik Sebagai Syarat Pemulihan Ekonomi. Krisis ekonomi 1997-1998 mengungkapkan ketidakstabilan sistem politik Orde Baru yang penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Saat ekonomi anjlok, keyakinan masyarakat

terhadap pemerintahan Soeharto juga hancur. Perubahan politik menjadi faktor krusial untuk pemulihan ekonomi karena investor memerlukan stabilitas serta kepastian hukum. Setelah Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998, pemerintahan BJ Habibie melaksanakan serangkaian reformasi politik: amandemen konstitusi, kebebasan media, pembentukan partai-partai baru, dan pelaksanaan pemilu demokratis pertama pada 1999. Desentralisasi kekuasaan menjadi salah satu warisan penting dari masa reformasi karena memperkuat partisipasi daerah dalam pengembangan ekonomi. Reformasi politik juga menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat: dari ketakutan bertransformasi menjadi kepercayaan diri terhadap pemerintahan baru yang lebih transparan. Stabilitas politik inilah yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan ekonomi di awal 2000-an.

## **KESIMPULAN**

Krisis ekonomi 1997-1998 adalah peristiwa paling penting dalam sejarah Indonesia modern yang memberikan dampak besar terhadap stabilitas ekonomi dan sistem politik Orde Baru. Krisis ini tidak hanya disebabkan oleh faktor luar seperti tekanan dari krisis di Thailand, tetapi juga karena struktur ekonomi yang lemah dan rentan sejak masa Orde Baru. Beberapa faktor penyebabnya meliputi ketergantungan tinggi pada utang luar negeri, nilai tukar rupiah yang terlalu tinggi, sistem perbankan yang tidak kuat, serta model pembangunan yang diarahkan ke

kelompok kecil. Dampaknya sangat parah, seperti penurunan produksi nasional hingga 13,7%, inflasi mencapai 77,6%, tingkat kemiskinan naik dari 15% menjadi lebih dari 33%, dan terjadi kerusuhan sosial yang akhirnya membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998. Untuk mengatasi krisis, pemerintah menerapkan berbagai langkah, seperti restrukturisasi perbankan melalui lembaga IBRA/BPPN, menerapkan paket reformasi dari IMF, kebijakan stabilisasi moneter dan fiskal, serta reformasi politik sebagai langkah awal memperbaiki kondisi ekonomi. Meskipun proses pemulihan membutuhkan waktu lama, kebijakan-kebijakan ini secara bertahap berhasil memulihkan stabilitas ekonomi dan membuka jalan menuju demokratisasi. Krisis 1997-1998 mengajarkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa hasil yang sebenarnya untuk rakyat, transparansi, pemerintahan yang baik, dan keadilan hanya akan berujung pada pertumbuhan yang tidak berkelanjutan dan rentan terhadap guncangan eksternal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, I. (2015). Determinan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sebelum dan Sesudah Krisis (Periode 1983-2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(1).
- Booth, A. (1999). The social impact of the Asian crisis: what do we know two years on?. *Asian-Pacific Economic Literature*, 13(2), 16-29.
- GSDRC. (2009). Indonesian Financial Crisis 1997-1998. Governance and Social Development Resource Centre. <https://gsdrc.org/publications/indonesian-financial-crisis-1997-1998/>
- Hamid, E. S., & Anto, M. H. (1997). Telaah Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 2(1), 16-28.
- Hermawandi, Y. (2019). Ekonomi Politik Neoliberalisme International Monetary Fund (Imf): Studi Kasus Indonesia 1997-1998. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 237-254.
- International Monetary Fund. (1998). *World Economic Outlook: Financial Crises-Causes and Indicators*. IMF. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/weo0598/pdf/0598ch2.pdf>
- Karmeli, E., & Fatimah, S. (2008). Krisis ekonomi Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 2(2), 164-173.
- Khairunnisa, E., Maisyaroh, D., & Putri, K. T. (2023). Analisis Kebijakan Moneter Terhadap Krisis Moneter 1997-1998 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 75-83.
- Mubyarto, M. (2001). Mengatasi Krisis Moneter Melalui Penguatan Ekonomi Rakyat. *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, 16(2), 97-110.
- Rochadi, S. (2014). Kebijakan industrial (isasi) dan kontinuitas konflik industrial pasca krisis ekonomi 1997/1998. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 27(2), 96-108.
- Suryahadi, A. (2000). The evolution of poverty during the crisis in Indonesia, 1996-99 (Vol. 2435). World Bank Publications.
- Tarmidi, L. T. (1999). Krisis moneter Indonesia: Sebab, dampak, peran IMF dan saran. *Bulletin of*

- Monetary Economics and Banking, 1(4), 1-25.
- Utami, M., & Rahayu, M. (2003). Peranan profitabilitas, suku bunga, inflasi dan nilai tukar dalam mempengaruhi pasar modal Indonesia selama krisis ekonomi. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 5(2), 123-131.
- Zaki, A. R., Al Isya, A. N. K., Arrahman, M. A., Shihabudin, M. L., & Nafisa, N. (2024). Analisis Dampak Krisis Moneter Tahun 1998 Terhadap Perekonomian Indonesia. *JEMBA: Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 2(3), 47-58.
- Saebani, B. A. (2024). Metode penelitian.
- Soendari, T. (2012). Metode penelitian deskriptif. Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka, 17, 75.